

## **BJS: Peningkatan PAD Bukan Hanya Tugas Bapenda**



Sumber gambar :Korankaltim.com Selasa,07/01/2025

### ➤ **Juga OPD Pengampu Retribusi dan Pajak Daerah**

**TENGGARONG** - Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dimaksimalkan jika diupayakan secara optimal oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintahan Kabupaten Kukar.

Hal inilah yang diharapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo (BJS). Disebutkannya, peningkatan pendapatan daerah bukan hanya tugas Bapenda, tapi juga keterlibatan aktif seluruh OPD.

"Kami selalu komunikasi, koordinasi, kolaborasi, bekerja sama dengan OPD yang terkait dengan PAD, apakah peluangnya nanti ada di retribusi atukah peluang ada di pajak daerah, tetapi ini semua jadi konsen kita bersama," kata pria yang akrab disapa BJS tersebut.

Bapenda tidak bisa bekerja sendiri, sambung dia, semua harus selalu berkolaborasi dan harus bekerja sama dengan semua OPD lain yang memang selaku perangkat daerah pengampu pajak daerah atau retribusi daerah.

"Kita selalu berkolaborasi dengan OPD lain yang pengampu PAD seperti yang berwenang mengurus pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu kita berharap OPD teknis ini bisa melaksanakan *High Level Meeting* (ILM) masing-masing," ungkapnya.

HLM, lanjut BJS, bertujuan untuk mengoptimalkan akselerasi perluasan dan implementasi elektronifikasi pajak dan retribusi daerah secara digital. Dalam penjelasannya, perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Kukar sejauh ini sudah signifikan kemajuannya, transparansi keuangan, mendukung tata kelola, dan integrasi sistem keuangan daerah saat ini sudah meningkat. Ini bertujuan mendukung transaksi pembayaran secara digital, keuangan inklusif, dan integrasi ekonomi serta keuangan digital nasional.

Saat ini yang harus dilakukan Kukar ialah tinggal bagaimana untuk mampu sama-sama meningkatkan kompetitif peningkatan PAD ini dengan cara kolaborasi antar semua OPD yang ada. BJS menegaskan pihaknya sangat bersyukur dengan kepemimpinan Bupati Kukar Edi Damansyah yang terus menggaungkan visi misi Kukar Idaman yang memiliki akronim, Inovasi Berdaya Saing dan Mandiri (Idaman).

"Pas banget kita punya visi misi Idaman ini, kita tidak mungkin bisa berkompetisi dengan daerah-daerah Jawa kalau kita tidak punya inovasi, ya harapannya nanti kita untuk memiliki daya saing, ya minimal kita nanti pasti bisa mandiri," tegasnya.

Dengan demikian Kukar ke depan tidak akan tergantung lagi pada dana transfer pusat karena nanti Kukar diharapkan bisa mandiri. "Dan di sini nanti ini perlu dukungan, kesiapan kita semua tidak hanya Bapenda tapi semua OPD itu harus siap nantinya harus bagaimana seperti visi misi Kukar Idaman yaitu berinovasi berdaya saing dan mandiri," pungkas BJS. (hei/sd/ts)

#### **Sumber berita:**

1. Korankaltim, BJS: Peningkatan PAD Bukan Hanya Tugas Bapenda, 07/01/25

#### **Catatan:**

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20, angka 21 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.